



Metode Profetik dalam Pendidikan Karakter Kepemimpinan Perspektif Al-Qur'an

Zakiyamani¹, Darwis Hude², Muhammad Hariyadi³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: baim3828@gmail.com, darwis@ptiq.ac.id, m.hariyadi@ptiq.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study concludes that leadership character education from the Qur'anic perspective can be effectively developed through prophetic methods rooted in the educational practices and values exemplified by the Prophet Muhammad (peace be upon him). The prophetic method integrates spiritual, moral, and practical dimensions in shaping leadership character, particularly honesty (shiddiq), trustworthiness (amānah), communicative competence (tabligh), and intellectual capacity (fathānah). The application of this method proves effective in producing Islamic leaders who uphold Islamic teachings, demonstrate exemplary conduct, carry out leadership responsibilities with integrity, uphold justice, and show concern for the welfare of their followers. Another significant finding of this study highlights the success of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as one of the most influential leaders in history and as an educator who successfully nurtured a generation of companions with outstanding leadership qualities. These conclusions were derived from an in-depth analysis of Qur'anic verses that indicate prophetic methods and leadership character education, examined comprehensively through a thematic interpretation approach. In addition, this research analyzes the patterns of interaction and educational strategies employed by the Prophet Muhammad (peace be upon him) in guiding his companions, which significantly contributed to the formation of leadership character and the development of leadership skills. Theoretically, this study aligns with the perspective of Warren Bennis, who argues that leaders are made rather than born, and supports the views of Muhammad Akrom Al-'Adlūni and Ronny Siagian, who emphasize that leadership character can be cultivated and strengthened through continuous learning processes. However, this study differs from the perspectives of Thomas Carlyle and William James, who assert that leadership is an innate quality possessed from birth. This research employs a qualitative library-based approach using descriptive analysis, content analysis, and conclusion drawing. The method of interpretation applied is thematic (maudhū'ī) exegesis with a historical approach to the life of the Prophet Muhammad (peace be upon him).

Keywords: Prophetic Method; Leadership Character Education; Qur'anic Perspective; Islamic Leadership; Thematic Tafsir; Character Education.

ABSTRAK

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dikembangkan melalui metode profetik yang berakar pada keteladanan dan nilai-nilai pendidikan Nabi Muhammad Saw. Metode profetik tersebut menekankan integrasi dimensi spiritual, moral, dan praksis dalam pembentukan karakter

kepemimpinan, khususnya nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, kemampuan komunikasi (*tabligh*), dan kecerdasan (*fathānah*). Penerapan metode ini terbukti efektif dalam melahirkan pemimpin Islami yang berpegang pada ajaran Islam, mampu menjadi teladan, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah kepemimpinan, bersikap adil, serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pengikutnya. Temuan penting lainnya mengungkap keberhasilan Nabi Muhammad Saw sebagai figur pemimpin paling berpengaruh sekaligus pendidik yang berhasil mencetak generasi sahabat dengan karakter kepemimpinan unggul. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung isyarat metode profetik dan pendidikan karakter kepemimpinan, yang dianalisis secara komprehensif menggunakan pendekatan tafsir tematik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pola interaksi dan strategi pendidikan Nabi Muhammad Saw dalam membina para sahabat yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas kepemimpinan mereka. Secara teoretis, penelitian ini sejalan dengan pandangan Warren Bennis yang menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan hasil proses pendidikan, serta sejalan dengan pemikiran Muhammad Akrom Al-'Adlūni dan Ronny Siagian yang menyatakan bahwa karakter kepemimpinan dapat ditanamkan dan dikembangkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan pandangan Thomas Carlyle dan William James yang menganggap kepemimpinan sebagai sifat bawaan sejak lahir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan tahapan analisis deskriptif, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhū'i*) dengan pendekatan historis terhadap kehidupan dan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

Kata Kunci: Metode Profetik; Pendidikan Karakter Kepemimpinan; Perspektif Al-Qur'an; Kepemimpinan Islami; Tafsir Tematik; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam menempati posisi yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan keteraturan kehidupan sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keagamaan. Urgensi kepemimpinan tersebut meniscayakan adanya seorang pemimpin dalam setiap bentuk komunitas, bahkan dalam kelompok yang berjumlah kecil sekalipun. Keberadaan pemimpin tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan kebutuhan prinsipil dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyyah yang menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan bagian integral dari agama, sebab kehidupan agama dan urusan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepemimpinan yang mengaturnya (Ahmad bin Abdul Halīm, 1418 H). Lebih lanjut, konsep kepemimpinan dalam Islam juga berakar pada kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:30. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai penerus tugas-tugas kenabian dalam memakmurkan bumi dan mengelola kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Amanah kekhalifahan ini secara implisit menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks ini, kepemimpinan manusia mencakup dua tanggung jawab utama, yaitu mengajak dan mendorong terwujudnya amal makruf

serta mencegah dan melarang terjadinya perbuatan mungkar dalam kehidupan bermasyarakat (Nawawi, 2001).

Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi membawa implikasi teologis dan moral bahwa setiap individu kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Konsekuensi ini menegaskan bahwa manusia secara fitrah dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, setidaknya dalam mengelola dan mengarahkan dirinya sendiri. Prinsip universal kepemimpinan tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, baik dalam lingkup negara, keluarga, maupun pengelolaan amanah lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam bersifat menyeluruh dan melekat pada setiap peran sosial yang dijalani manusia (Al-Bukhari, 1987). Dalam konteks praksis, kepemimpinan selalu berkaitan dengan tanggung jawab yang bersifat berjenjang, mulai dari tanggung jawab personal hingga tanggung jawab sosial yang lebih luas. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, seorang majikan terhadap para pekerjanya, atasan terhadap bawahannya, hingga pemimpin negara terhadap rakyat yang dipimpinnya. Namun, tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam tidak dimaknai sebatas pelaksanaan tugas secara formal tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Lebih dari itu, tanggung jawab kepemimpinan menuntut adanya upaya nyata untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin (Sidiq, 2014).

Makna tanggung jawab tersebut juga dapat dipahami dari aspek kebahasaan istilah *ra'ā* yang berarti menggembala, serta *ra'in* yang bermakna penggembala. Secara konseptual, pemimpin dianalogikan sebagai seorang penggembala yang memiliki kewajiban merawat, memberi makan, dan menyediakan perlindungan bagi gembalaannya. Analogi ini menegaskan bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekadar mengatur atau memerintah, melainkan mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, dan keberlangsungan hidup yang layak bagi pihak yang dipimpin (Munawwir, 2007). Keberadaan pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan pihak yang dipimpin merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial. Setidaknya terdapat beberapa alasan utama mengapa kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan. Pertama, secara kodrati manusia membutuhkan keteraturan agar kehidupan bersama dapat berjalan secara harmonis. Kedua, dalam kondisi tertentu diperlukan figur yang mampu mewakili kepentingan kelompok atau komunitas. Ketiga, pemimpin berperan sebagai pihak yang menanggung dan mengelola risiko ketika kelompok menghadapi tekanan atau ancaman. Keempat, kepemimpinan berfungsi sebagai wadah legitimasi kekuasaan agar kewenangan tidak berjalan secara liar dan tidak terkontrol (Rivai, 2004).

Kualitas seorang pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Kebaikan dan integritas pemimpin akan berdampak positif pada stabilitas dan kemaslahatan sosial, sementara keburukan dan ketidakcakapan pemimpin dapat menimbulkan kerusakan yang meluas. Oleh karena itu, Rasulullah Saw menegaskan pentingnya menyerahkan amanah kepemimpinan kepada orang yang memiliki keahlian dan kompetensi. Dalam

penjelasannya terhadap hadis tersebut, Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari menegaskan bahwa penyerahan urusan kepada pihak yang tidak ahli merupakan pertanda dekatnya kehancuran tatanan sosial, yang ditandai dengan kekacauan sistem, lemahnya penegakan agama dan hukum, serta rusaknya kehidupan masyarakat akibat buruknya kualitas pemimpin (Al-Bukhari, t.t.; Al-Qari, 1422 H). Lebih jauh, kemajuan atau kemunduran suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Keadilan, kreativitas, dan tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan amanah menjadi faktor penentu terciptanya keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kepemimpinan yang zalim dan tidak bertanggung jawab akan membawa dampak destruktif bagi kehidupan sosial dan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan para mufasir yang menegaskan bahwa kerusakan sosial sering kali berakar dari rusaknya pemimpin yang gagal menjaga amanah kekuasaan (Ibnu Katsir, 2000).

Oleh sebab itu, pemilihan pemimpin harus didasarkan pada kecakapan dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Seorang pemimpin yang memiliki *leadership skill* mampu mengidentifikasi persoalan secara tepat, merumuskan strategi yang efektif, melaksanakan kebijakan secara terukur, serta mengantisipasi risiko melalui perencanaan yang matang. Namun demikian, seluruh kapasitas tersebut tidak akan bermakna apabila pemimpin tidak disertai dengan kesadaran moral untuk bertanggung jawab atas amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ketika rasa tanggung jawab melemah, kepemimpinan berpotensi disalahgunakan, penyelewengan kekuasaan semakin meluas, dan pada akhirnya merusak struktur kepemimpinan itu sendiri (Najib, 2013). Seorang pemimpin ideal dituntut memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan figur teladan bagi pihak yang dipimpin, sehingga ia harus mencerminkan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang baik. Posisi pemimpin sebagai figur yang “dituakan” mengharuskannya menjaga martabat diri serta mampu membimbing, mengarahkan, melindungi, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Konsep kepemimpinan tersebut sejalan dengan falsafah kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan keteladanan di depan, kemampuan membangun semangat dan prakarsa di tengah, serta memberi dorongan dan penguatan dari belakang. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok atau organisasi (Marsetio, 2018).

Dalam perspektif organisasi, pemimpin sering dianalogikan sebagai pusat kendali atau “otak” yang menentukan arah dan keberlangsungan sebuah lembaga. Ketika fungsi kepemimpinan tidak berjalan secara optimal, maka kehancuran organisasi menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kriteria kepemimpinan yang jelas, nilai-nilai dasar yang kuat, serta moralitas yang terjaga. Berbagai realitas menunjukkan bahwa kesalahan dalam memilih pemimpin dapat menimbulkan mudarat dan kerusakan yang luas, baik dalam lembaga pemerintahan, dunia kerja, maupun institusi pendidikan. Fenomena maraknya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh para pejabat publik menunjukkan lemahnya nilai dan moralitas kepemimpinan yang dijalankan (Hafidah, 2019). Kondisi tersebut juga mencerminkan urgensi

pendidikan karakter dalam membentuk pemimpin yang berintegritas. Tanpa fondasi karakter yang kuat, kekuasaan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik. Hal ini diperkuat oleh berbagai laporan media yang menyoroti krisis moral di ranah kepemimpinan nasional, salah satunya diberitakan oleh harian *Kompas* yang menempatkan isu kerusakan moral sebagai persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kompas, 2011). Oleh karena itu, penguatan nilai moral dan karakter kepemimpinan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Samani & Hariyanto, 2012).

Berbagai laporan media dan kajian akademik menunjukkan bahwa persoalan korupsi di kalangan penyelenggara negara telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sejumlah fakta mengungkap bahwa dalam kurun waktu 2004–2011, ratusan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota terjerat kasus korupsi, diikuti puluhan anggota DPR yang tersandung kasus serupa dalam periode 2008–2011. Selain itu, praktik korupsi juga melibatkan anggota legislatif lintas partai serta terjadi di berbagai lembaga strategis negara, seperti lembaga pemilu, lembaga peradilan, otoritas perpajakan, perbankan nasional, dan badan penanaman modal. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tidak bersifat sektoral, melainkan telah merambah hampir seluruh institusi publik (Mansur, 2013). Fenomena penyimpangan juga terjadi pada institusi penegak hukum. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah aparat hukum yang dijatuhi sanksi disiplin, mulai dari hakim, jaksa, hingga aparat kepolisian, baik dalam bentuk teguran, pemberhentian, maupun pemecatan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan integritas tidak hanya terjadi pada ranah eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyentuh institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan (Mansur, 2013).

Secara konseptual, korupsi merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pejabat publik dengan melanggar norma sosial, hukum, dan etika demi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya nilai moral dalam kepemimpinan. Bahkan, korupsi di kalangan elite pemerintahan di Indonesia cenderung menjadi fenomena sistemik yang sulit diberantas. Dalam rentang waktu 2004–2020, mayoritas provinsi di Indonesia tercatat pernah dipimpin oleh gubernur yang terlibat kasus korupsi. Tidak hanya itu, sejumlah menteri dari berbagai periode pemerintahan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara kasus serupa turut menjangkiti pemerintahan di tingkat desa dengan jumlah yang tidak sedikit (Malau, 2020; Ramadhan, 2020; Kartika, 2021). Maraknya praktik korupsi yang melibatkan para pemimpin berdampak serius terhadap keadilan dan kesetaraan sosial. Korupsi menciptakan kesenjangan yang tajam antarindividu dan kelompok sosial, baik dalam aspek ekonomi, kekuasaan, maupun prestise sosial. Lebih jauh, korupsi merusak standar moral dan intelektual masyarakat, menghilangkan nilai-nilai keutamaan, serta menumbuhkan budaya keserakahan, egoisme, dan sikap sinis terhadap institusi negara. Dalam perspektif pembangunan, korupsi tidak hanya menghambat

kemajuan ekonomi, tetapi juga melemahkan fondasi etika dan peradaban suatu bangsa (Mohamad, 1986; Theobald, 1990).

Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian materi negara, tetapi juga membentuk pola sikap individualistik yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Praktik korupsi mendorong pelakunya untuk bersikap egois, berorientasi pada keuntungan diri sendiri, serta mengabaikan nilai moral dan tanggung jawab sosial yang seharusnya melekat pada jabatan publik. Dalam konteks ini, korupsi mencerminkan degradasi karakter kepemimpinan yang menjauh dari prinsip keadilan, amanah, dan pelayanan kepada masyarakat (Setiadi, 2018). Dampak buruk tersebut semakin memperburuk catatan sejarah kepemimpinan nasional, terlebih ketika perilaku menyimpang para pemimpin tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga merambah ke pelanggaran moral dan etika. Sejumlah kasus asusila yang melibatkan pejabat publik, mulai dari kepala daerah hingga aparat pemerintahan tingkat desa, menunjukkan lemahnya integritas dan kontrol moral dalam kepemimpinan. Beberapa kepala daerah tercatat dicopot dari jabatannya karena terjerat kasus asusila, termasuk kasus pencabulan terhadap anak, sementara pada level pemerintahan desa pun ditemukan pemimpin yang diberhentikan akibat pelanggaran serupa. Fenomena ini menandakan bahwa krisis moral kepemimpinan tidak bersifat kasuistik, melainkan sistemik dan meluas lintas jenjang kekuasaan (Dzakwan, 2017; Detikcom, 2020; Ramadhan, 2020; Sako, 2020).

Selain pelanggaran moral, keterlibatan pemimpin dalam penyalahgunaan narkoba turut memperburuk citra kepemimpinan publik. Beberapa pejabat daerah dan pimpinan lembaga legislatif tercatat terlibat dalam kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun dalam aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat terlarang. Kasus-kasus tersebut tidak hanya merusak wibawa pribadi pemimpin, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan melemahkan legitimasi kepemimpinan itu sendiri (Hutabarat, 2016; Ronald, 2018). Secara keseluruhan, rangkaian penyimpangan perilaku tersebut—baik korupsi, pelanggaran asusila, maupun penyalahgunaan narkoba—menunjukkan krisis serius dalam dimensi moral dan karakter kepemimpinan. Kondisi ini mempertegas urgensi pembinaan kepemimpinan yang berbasis nilai, etika, dan karakter, agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan kepemimpinan benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan bersama.

Fenomena penyimpangan perilaku pemimpin juga tercermin dari keterlibatan pejabat publik dalam penyalahgunaan narkoba. Pada periode yang sama, seorang Kepala Dinas Perindustrian di Aceh Utara dilaporkan ditangkap aparat kepolisian karena tertangkap tangan mengonsumsi narkoba di kediamannya. Peristiwa ini semakin mempertegas rapuhnya integritas moral sebagian pemimpin publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat (Masriadi, 2018). Di sisi lain, masyarakat Indonesia pada hakikatnya mendambakan sosok pemimpin yang memiliki karakter kuat dan berintegritas guna mewujudkan tujuan bernegara, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Namun realitas menunjukkan masih banyak pemimpin yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berbagai pemberitaan media massa kerap

menampilkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Kondisi ini tidak hanya merugikan kepercayaan publik, tetapi juga berdampak negatif terhadap dunia pendidikan yang memikul tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter generasi penerus kepemimpinan bangsa (Asnafiyah, 2014).

Situasi tersebut menunjukkan adanya gejala degradasi nilai-nilai kepemimpinan yang ditandai dengan konflik kepentingan serta memudarnya keteladanan para pemimpin. Lunturnya nilai-nilai moral dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan melahirkan sikap sinis di tengah masyarakat terhadap figur pemimpin yang menuntut untuk dilayani, bukan melayani, serta menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma etika dan hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa krisis kepemimpinan bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga krisis karakter dan moralitas (Marsetio, 2018). Pada usia kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, bangsa ini membutuhkan kebangkitan integritas moral yang menyeluruh, baik dari para pemimpin maupun seluruh elemen masyarakat. Moralitas merupakan fondasi utama dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pembinaan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral intrinsik yang terinternalisasi dalam kehidupan pribadi seorang pemimpin. Kepemimpinan yang bertumpu pada karakter intrinsik diyakini mampu melahirkan kepercayaan dan keteladanan yang kuat di tengah masyarakat (Gymnastiar, 2013).

Pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian moral akan meninggalkan jejak kepemimpinan yang dikenang dan dicintai oleh rakyat, bahkan setelah ia tidak lagi memegang jabatan atau telah wafat. Teladan kepemimpinan semacam ini dapat ditemukan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, khususnya ketika beliau mengambil keputusan strategis dalam Perang Badar. Keberanian beliau dalam menetapkan pilihan yang diridhai Allah SWT menjadi contoh bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari kekuasaan, tetapi dari keberanian moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Gymnastiar, 2013).

Pemimpin yang memiliki integritas dan dapat dipercaya cenderung mampu menumbuhkan loyalitas serta kesetiaan dari para pengikut dan kader penerusnya. Kepercayaan tersebut muncul karena pemimpin tidak hanya berperan mengarahkan dan membimbing, tetapi juga memberikan penguatan dan pengaruh yang signifikan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Besarnya pengaruh tersebut menjadikan pemimpin memikul tanggung jawab yang sangat besar, termasuk menanggung risiko atas pemikiran dan tindakan pihak lain yang terpengaruh oleh kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pembinaan karakter kepemimpinan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka melahirkan pemimpin yang adil, amanah, dan mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya secara optimal (Agustian, 2002).

Pendidikan karakter kepemimpinan pada hakikatnya merupakan persoalan strategis umat. Kebangkitan dan kemajuan umat sangat bergantung pada kualitas pemimpin yang dipersiapkan sejak dini melalui peran aktif lembaga-lembaga pendidikan. Masa depan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kesungguhan

umat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas kepemimpinan unggul. Oleh karena itu, perhatian serius dan investasi yang memadai dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan menjadi keniscayaan untuk mencetak pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman (Kartono, 1998). Namun demikian, sejak lama berkembang pandangan yang meyakini bahwa kepemimpinan merupakan bakat alamiah yang tidak dapat dipelajari. Pandangan ini beranggapan bahwa keberhasilan seorang pemimpin semata-mata ditentukan oleh kemampuan bawaan sejak lahir, seperti kharisma dan kewibawaan, sehingga teori dan pendidikan kepemimpinan dianggap tidak terlalu diperlukan. Keberhasilan kepemimpinan dipersepsikan sebagai hasil dari keberuntungan individu yang dianugerahi bakat luar biasa untuk memengaruhi dan menggerakkan massa (Siagian, 2015).

Selain itu, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa pemimpin tidak dilahirkan, melainkan dibentuk melalui proses pendidikan dan pengalaman. Karakter serta efektivitas kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah, berkelanjutan, dan intensif. Melalui proses tersebut, individu diberikan kesempatan luas untuk mempelajari konsep, karakteristik, gaya, fungsi, dan peran kepemimpinan. Pada akhirnya, pengalaman pendidikan tersebut akan membantu seseorang menemukan jati diri kepemimpinannya dan membentuk gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kepribadian dan konteks sosial yang dihadapi (Siagian, 2015). Pandangan moderat mengenai kepemimpinan berupaya mengintegrasikan dua kutub ekstrem, yaitu bahwa karakter kepemimpinan tidak semata-mata bersumber dari bakat bawaan sejak lahir maupun hasil pendidikan semata, melainkan merupakan hasil interaksi antara potensi dasar dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Bakat kepemimpinan dipandang sebagai modal awal yang penting, namun tanpa kesempatan memimpin, pengalaman nyata, serta penguasaan pengetahuan teoritis, bakat tersebut tidak akan berkembang secara optimal. Bahkan, potensi kepemimpinan yang tidak dipupuk melalui pendidikan dan latihan akan mengalami stagnasi dan kehilangan fungsinya. Sebaliknya, individu yang hanya dibekali pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tanpa dukungan bakat dasar cenderung mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan teori ke dalam praktik kepemimpinan yang efektif (Syauqi, 1992; Al-'Adluni, 1421 H).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Thariq As-Suwaidan menegaskan bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan langsung sebagai pemimpin siap pakai. Kepemimpinan merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembentukan, dan pengalaman yang panjang. Ia juga menolak anggapan bahwa karakter kepemimpinan sepenuhnya diwariskan secara genetis, karena sifat-sifat bawaan yang dianggap sebagai ciri pemimpin sering kali juga ditemukan pada individu yang tidak menjalankan peran kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan bukanlah penentu tunggal dalam pembentukan karakter kepemimpinan (Suwaidan & Basyâhil, 2011). Dengan demikian, karakter kepemimpinan pada diri seseorang tidak terbentuk hanya melalui faktor genetik maupun pelatihan formal semata, melainkan melalui proses pendidikan yang terarah, pembiasaan yang konsisten, pengaruh lingkungan, serta pengalaman belajar yang

berkesinambungan, dengan tetap ditopang oleh potensi dasar seperti kemampuan intelektual dan fisik. Pandangan ini dipandang lebih komprehensif karena mengakomodasi dimensi fitrah sekaligus peran lingkungan dalam membentuk kepribadian dan karakter kepemimpinan. Perspektif tersebut selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sementara lingkungan, khususnya peran orang tua, memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah perkembangan kepribadian seseorang (Al-Bukhari, t.t.).

Hadis tersebut menegaskan adanya hubungan yang kuat antara faktor bawaan (fitrah) dan pengaruh lingkungan dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, namun arah perkembangan kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh pola asuh, pendidikan, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua serta lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki peran signifikan dan nyata dalam proses tumbuh kembang anak, tanpa menafikan keberadaan faktor genetik atau warisan biologis yang turut membentuk potensi dasar individu (At-Thahhân, 1431 H). Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan memimpin bukanlah sesuatu yang bersifat instan, melainkan dapat dipelajari dan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Sebagaimana keterampilan lainnya, kepemimpinan menuntut proses pembelajaran yang sistematis melalui pendidikan formal, pelatihan, refleksi atas pengalaman pribadi, maupun pembelajaran dari pengalaman orang lain. Proses tersebut membutuhkan kesungguhan, kerja keras, serta konsistensi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pembentukan kepemimpinan tidak cukup hanya dengan mengikuti seminar atau pelatihan singkat, tetapi memerlukan proses pembinaan yang terus-menerus dan berkesinambungan (Roni Siagian, t.t.).

Meskipun berbagai metode telah diterapkan dalam pendidikan karakter calon pemimpin, hasil yang dicapai sering kali belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah krisis ketulusan dan keikhlasan dari para pendidik. Sebagaimana dinukil dari perkataan ulama salaf, keberkahan ilmu dan nasihat sangat ditentukan oleh niat yang melandasinya. Dinyatakan bahwa perkataan generasi terdahulu lebih memberikan pengaruh karena disampaikan demi kemuliaan Islam, keselamatan jiwa, dan mengharap rida Allah SWT, bukan untuk kepentingan pribadi atau pengakuan manusia. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Rajab al-Hanbali yang mengutip bahwa Imam al-Bukhari menjadikan hadis tentang niat sebagai pembuka dalam kitab Shahih-nya, menandakan urgensi keikhlasan dalam setiap amal pendidikan (As-Sulami, 1424 H). Selain itu, kegagalan pendidikan kepemimpinan juga disebabkan oleh penerapan sanksi yang tidak proporsional dan tidak edukatif terhadap peserta didik. Hukuman yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perbaikan perilaku justru kehilangan nilai pendidikannya apabila dilakukan secara berlebihan, tidak terukur, dan melanggar prinsip kemanusiaan. Praktik pemberian sanksi yang keliru tidak hanya gagal membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang merugikan. Hal ini tercermin dari kasus yang terjadi pada tahun 2015 di Situbondo, ketika seorang guru sekolah

dasar memberikan hukuman tidak pantas kepada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga menuai kecaman luas dan menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dalam disiplin pendidikan (Dasuqi, 2017).

Sejumlah peristiwa kekerasan dalam dunia pendidikan menunjukkan lemahnya penerapan pendekatan edukatif dalam pembinaan peserta didik. Pada Oktober 2015 di Ternate, Maluku Utara, seorang guru SMA di Kecamatan Moti dilaporkan memberikan hukuman fisik kepada siswanya dengan menggunakan mistar kayu sepanjang kurang lebih 66 sentimeter hingga menyebabkan siswa tersebut meninggal dunia (Fatimah Yamin, 2015). Kasus serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur, pada November 2016, ketika seorang guru memberikan hukuman yang tidak manusiawi dengan memaksa murid-muridnya menelan lem karena dianggap melanggar peraturan sekolah (Yakub Mulyono, 2016). Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan kegagalan pendidik dalam memahami hakikat pendidikan yang seharusnya membina, bukan melukai. Selain kekerasan fisik, krisis keteladanan juga menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, pemimpin lembaga pendidikan dan para pendidik belum sepenuhnya mampu menjadi figur teladan, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, dalam beberapa kasus, figur yang seharusnya menjadi panutan justru mencederai nilai-nilai keteladanan itu sendiri. Misalnya, pada November 2020, enam kepala sekolah dasar dan seorang guru SD di Kota Bogor harus menjalani proses hukum akibat keterlibatan mereka dalam kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan nilai yang sangat besar (Mega Nugraha, 2020). Tidak hanya itu, pada Januari 2020 terungkap pula kasus asusila yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dasar di wilayah Kuta Utara, Provinsi Bali, terhadap siswinya, yang semakin memperburuk citra moral kepemimpinan di lingkungan pendidikan (Imam Rosidin, 2020).

Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam kasus korupsi, kekerasan, maupun asusila jelas tidak mencerminkan nilai keteladanan bagi peserta didik, bahkan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter mereka. Padahal, keteladanan merupakan salah satu metode paling efektif dalam pendidikan kepemimpinan karena nilai-nilai moral lebih mudah ditransmisikan melalui contoh nyata daripada sekadar nasihat verbal. Asy-Syathibi menegaskan bahwa apabila ucapan berfungsi sebagai penjelas kebenaran, maka perbuatanlah yang menjadi saksi atas kebenaran tersebut (asy-Syathibi, 1417 H). Sejalan dengan itu, Ibnu al-Qayyim mengingatkan bahwa seorang alim atau pemimpin yang dikuasai ambisi jabatan atau hawa nafsu akan terdorong untuk menyimpang dari kebenaran, sehingga kehilangan otoritas moralnya sebagai teladan (Ibn al-Qayyim, 1393 H). Menyadari pentingnya metode pendidikan karakter kepemimpinan, penulis memandang perlu untuk menghadirkan pendekatan profetik, yakni metode pendidikan yang bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad Saw. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai teladan ideal bagi umat manusia dalam sikap dan perilaku, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kehadiran beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya/21:107). Oleh karena itu, metode kepemimpinan Nabi Muhammad Saw menjadi rujukan fundamental dalam

membangun karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan (Sakdiah, 2016).

Nabi Muhammad Saw dikenal sebagai sosok pemimpin yang berhasil, baik dalam ranah spiritual-keagamaan maupun dalam urusan sosial dan kemasyarakatan. Kepemimpinan beliau tidak hanya dihormati oleh para sahabat, tetapi juga disegani oleh para lawannya. Dalam menghadapi permusuhan, Nabi Muhammad Saw senantiasa menunjukkan akhlak yang luhur, bersikap santun, sabar, dan penuh keteguhan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang memusuhinya untuk menghentikan perjuangan dakwah tidak pernah menggoyahkan konsistensi beliau dalam menegakkan kebenaran. Keteguhan prinsip, kemampuan memahami kekuatan dan kelemahan, kesediaan belajar dari pengalaman, serta kecakapan bekerja sama dengan orang lain menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai figur pemimpin yang utuh dan berintegritas. Keteladanan beliau dalam mengamalkan setiap nasihat dan keputusan yang diambil semakin menegaskan kemuliaan pribadi dan kepemimpinannya (Sakdiah, 2016). Menariknya, hampir seluruh konsep dan teori kepemimpinan modern yang dikemukakan oleh para pakar kepemimpinan dapat ditemukan dalam praktik kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah teori fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stephen Covey, yang menekankan bahwa seorang pemimpin ideal harus menjalankan empat peran utama, yaitu sebagai perintis arah (pathfinding), penyelaras tujuan (aligning), pemberdaya potensi (empowering), dan teladan dalam tindakan (modeling). Keempat fungsi tersebut secara nyata telah tercermin dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, baik dalam mengelola umat, membangun peradaban, maupun dalam membentuk karakter para pengikutnya (Covey, 2004).

Selanjutnya, sulit untuk disangkal bahwa Nabi Muhammad Saw pada masanya berperan sebagai pemimpin negara, hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai kebijakan dan tindakan kenegaraan yang beliau lakukan. Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Nabi Muhammad Saw menyusun aturan tertulis sebagai dasar hukum, mempersatukan masyarakat Madinah yang majemuk, menjalin perjanjian-perjanjian damai, menjamin kebebasan beragama bagi seluruh kelompok, serta mengelola sistem pertahanan dan memimpin langsung berbagai peperangan. Selain itu, beliau juga menerima dan mengirim utusan diplomatik, mengirimkan surat-surat resmi kepada para penguasa, serta menunjuk para wali atau pejabat daerah untuk menjalankan pemerintahan di berbagai wilayah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga administratif dan politis (Dahlan, 2018; As-Siddy, t.th.). Keberhasilan terbesar Nabi Muhammad Saw terletak pada kemampuannya memimpin negara sekaligus memimpin agama, serta meletakkan fondasi kehidupan politik yang berkeadilan dan berperadaban. Fondasi inilah yang kemudian menjadi titik awal tersebarnya Islam hingga melampaui batas geografis Jazirah Arab dan berkembang menjadi agama besar yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia. Lahirnya Piagam Madinah menjadi bukti nyata kecakapan kenegaraan Nabi Muhammad Saw, karena piagam tersebut tidak hanya mengatur kepentingan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi hak-hak komunitas

Yahudi serta mempersatukan seluruh elemen masyarakat Madinah di bawah satu kepemimpinan. Bagi kaum Muslimin, Nabi Muhammad Saw berhasil menanamkan persatuan dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, sementara di kalangan Anshar sendiri beliau mampu mendamaikan hubungan antarsuku yang sebelumnya dipenuhi konflik dan permusuhan (Dahlan, 2018).

Nabi Muhammad Saw merupakan figur unik dalam sejarah umat manusia karena keberhasilannya membangun peradaban sekaligus membentuk manusia-manusia unggul yang menopangnya. Michael H. Hart, seorang ilmuwan Barat, dalam karyanya *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh nomor satu sepanjang sejarah. Hart menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya tokoh yang mencapai keberhasilan luar biasa, baik dalam aspek keagamaan maupun urusan duniawi, serta diakui sebagai pemimpin yang autentik, efektif, dan memiliki pengaruh yang mendalam serta bertahan lintas zaman (Hart, 1993). Selain dikenal sebagai pemimpin negara dan agama yang sukses, Nabi Muhammad Saw juga merupakan pendidik yang berhasil mencetak generasi pemimpin berkualitas. Banyak di antara para sahabat beliau yang kemudian tampil sebagai pemimpin yang amanah dan mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari metode pendidikan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam membina para sahabat, sehingga mereka siap memikul amanah kepemimpinan dan menjalankan tugas memakmurkan bumi secara bertanggung jawab (As-Siddy, t.th.).

Kualitas dan mutu metode pendidikan Nabi Muhammad Saw dapat dilihat dari hasil didikannya, yaitu para sahabat yang mendapat pengakuan langsung dari Allah SWT. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah meridai kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan menyediakan bagi mereka surga sebagai balasan atas keimanan dan pengorbanan mereka. Ridha Allah SWT terhadap para sahabat menunjukkan keutamaan dan kualitas mereka dibanding generasi-generasi setelahnya. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi beliau, kemudian generasi setelahnya, dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, Adil As-Siddy menegaskan bahwa tidak ada metode pendidikan yang terbukti paling efektif dan unggul dalam membentuk manusia dan pemimpin, selain metode pendidikan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw (As-Siddy, t.th.).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui betapa pentingnya mengeksplorasi metode yang diterapkan Nabi Muhammad Saw dalam mendidik karakter pemimpin, untuk melahirkan generasi pemimpin dan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas, amanah, dan mampu menjadi pemimpin yang ideal bagi masyarakat. Setelah berupaya melakukan penelusuran di perpustakaan dan belum ditemukannya orang yang membahas ini sebagai disertasi, maka penulis berusaha untuk mengangkat tema dalam disertasi ini dengan judul "Metode Profetik Dalam Pendidikan Karakter Kepemimpinan Perspektif Al-Quran." Semoga Allah SWT berikan kemudahan agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian. Pendekatan ini tidak mengandalkan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks fenomena yang dikaji secara mendalam dan holistik (Furchan, 1992; Salim & Syahrur, 2012; Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena sosial, sikap, kepercayaan, dan aktivitas manusia, baik secara individual maupun kelompok. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengambilan data dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sukmadinata, 2009; Sugiyono, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yang bertujuan memahami konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat Arab sebelum dan pada masa turunnya Al-Qur'an. Pendekatan ini penting untuk menelaah pengaruh kondisi sosio-kultural terhadap pemahaman mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan metode profetik dalam pendidikan karakter kepemimpinan, serta erat kaitannya dengan kajian *asbāb an-nuzūl* (Subadi, 2006; Hanafi dkk., 2012). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan rujukan utama, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang relevan dengan tema pendidikan profetik dan karakter kepemimpinan (Kadir, 2007). Sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan karya tulis lain yang membahas metode pendidikan profetik dan konsep karakter kepemimpinan. Sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memperkuat interpretasi terhadap data primer (Sukardi, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan satu kesatuan makna (Musthafa Muslim, 2000). Tafsir maudhu'i dilakukan dengan langkah-langkah: menentukan tema, menghimpun ayat-ayat terkait, menyusun urutan ayat berdasarkan kronologi turunnya, memahami *munāsabah* dan *asbāb an-nuzūl*, melengkapi dengan hadis serta pendapat ulama, lalu menarik kesimpulan secara utuh dan sistematis (Al-Kummy & Al-Qasim, 1982; Abdul Kadir, 2007). Metode ini dinilai relevan karena membantu penulis mengkaji konsep pendidikan karakter kepemimpinan berbasis profetik secara terarah, mendalam, dan terpadu, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan pendidikan kepemimpinan Islam (Hanafi dkk., 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode profetik dalam pendidikan karakter kepemimpinan perspektif Al-Qur'an merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pembentukan karakter pemimpin secara menyeluruh, mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Metode ini bersumber dari nilai-nilai kenabian yang terinternalisasi dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, yang menempatkan keteladanan (uswah), pembiasaan nilai, serta transformasi akhlak sebagai inti dari proses pendidikan kepemimpinan. Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif profetik tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan dengan integritas moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memosisikan pemimpin sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki kewajiban memakmurkan kehidupan, menegakkan nilai kebenaran, serta membimbing manusia menuju kemaslahatan bersama.

Dalam konteks pendidikan, metode profetik menampilkan pola pendidikan yang bersifat humanis dan transformatif, di mana proses pembentukan karakter kepemimpinan dilakukan melalui internalisasi nilai tauhid, penguatan kesadaran moral, serta pengembangan sikap amanah, istiqamah, dan keberanian mengambil keputusan yang berlandaskan nilai kebenaran. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh kualitas karakter, bukan semata-mata oleh kecakapan teknis atau intelektual. Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menguraikan secara sistematis konsep, prinsip, dan implementasi metode profetik dalam pendidikan karakter kepemimpinan berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan ayat-ayat tematik, praktik kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, serta relevansinya terhadap tantangan pendidikan kepemimpinan kontemporer, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pendidikan karakter kepemimpinan berbasis nilai-nilai profetik. Maka dari itu ada beberapa komponen yang relevan dan harus di bahas pada penelitian ini salah satunya yaitu, sebagai berikut:

Analisis Teoretis Metode Profetik dan Pembentukan Karakter Kepemimpinan

Metode profetik dalam pendidikan merupakan pendekatan yang meneladani nilai, strategi, dan praktik pendidikan Nabi Muhammad SAW sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara teoretis, metode ini berpijak pada pandangan bahwa Nabi bukan hanya sebagai pembawa risalah, tetapi juga sebagai pendidik dan pemimpin yang berhasil membentuk karakter umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, metode profetik memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada nilai spiritual, moral, dan sosial secara integratif (Sakdiah, 2016; Abuddin Nata, 2010). Dalam perspektif pendidikan Islam, karakter kepemimpinan tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan manajerial, tetapi mencakup dimensi akhlak, tanggung jawab, dan keteladanan. Metode profetik menekankan bahwa kepemimpinan harus dibangun melalui internalisasi nilai-nilai tauhid, amanah, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai ini ditanamkan Nabi Muhammad SAW melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial umatnya (Rusnadi Hafidah, 2019; Marsetio, 2018).

Secara teoretis, metode profetik memiliki kesesuaian dengan teori pendidikan karakter modern yang menekankan pembiasaan, keteladanan, dan penguatan nilai. Nabi Muhammad SAW menggunakan keteladanan (uswah

hasanah) sebagai metode utama dalam mendidik para sahabatnya. Keteladanan ini terbukti efektif dalam membentuk karakter kepemimpinan yang kuat karena nilai yang diajarkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari (Muchlas Samani & Hariyanto, 2011; Ahmad Tafsir, 2013). Metode profetik juga menekankan aspek humanistik dalam pendidikan kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW memahami potensi, latar belakang, serta perbedaan karakter setiap individu sahabatnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif. Dalam konteks kepemimpinan, pendekatan humanistik ini melahirkan pemimpin yang empatik, mampu berkomunikasi secara efektif, dan bijak dalam mengambil keputusan (Abuddin Nata, 2012; Sakdiah, 2016).

Pembentukan karakter kepemimpinan melalui metode profetik juga dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai moral dan sosial. Nabi Muhammad SAW membiasakan para sahabat untuk bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan umat. Pembiasaan ini berlangsung dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan keagamaan, sehingga nilai kepemimpinan tertanam secara kuat dalam diri para sahabat (Rusnadi Hafidah, 2019; Muchlas Samani & Hariyanto, 2011). Dari sudut pandang teori kepemimpinan Islam, metode profetik mengintegrasikan antara kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan sosial. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memimpin umat dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Integrasi ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan yang ideal adalah karakter yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat (Marsetio, 2018; Ahmad Tafsir, 2013).

Metode profetik juga mengajarkan pentingnya musyawarah sebagai bagian dari pembentukan karakter kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW senantiasa melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan strategis. Praktik musyawarah ini membentuk karakter pemimpin yang demokratis, terbuka terhadap kritik, dan menghargai pendapat orang lain. Dalam teori kepemimpinan modern, prinsip ini sejalan dengan konsep kepemimpinan partisipatif (Abuddin Nata, 2010; Sakdiah, 2016). Selain itu, metode profetik menanamkan karakter kepemimpinan melalui penguatan nilai tanggung jawab dan amanah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini membentuk pemimpin yang memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas kepemimpinannya (Rusnadi Hafidah, 2019; Marsetio, 2018).

Secara teoretis, efektivitas metode profetik dalam pembentukan karakter kepemimpinan dapat dilihat dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW melahirkan generasi sahabat yang unggul. Para sahabat tidak hanya sukses sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin pemerintahan, militer, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa metode profetik memiliki daya transformasi yang kuat dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berkelanjutan (Sakdiah, 2016; Abuddin Nata, 2012). Dengan demikian, analisis teoretis menunjukkan bahwa metode profetik merupakan pendekatan pendidikan yang komprehensif dan relevan dalam pembentukan karakter kepemimpinan. Metode ini mengintegrasikan nilai spiritual,

moral, sosial, dan intelektual secara harmonis. Oleh karena itu, metode profetik layak dijadikan landasan konseptual dalam pengembangan pendidikan karakter kepemimpinan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer (Muchlas Samani & Hariyanto, 2011; Ahmad Tafsir, 2013).

Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dalam Pendidikan Karakter

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan karakter merupakan model kepemimpinan integral yang memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Nabi tidak hanya menyampaikan ajaran normatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter melalui proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian umat. Dalam konteks ini, kepemimpinan Nabi berfungsi sebagai sarana transformasi nilai, di mana pendidikan karakter menjadi inti dari misi kerasulan (Hasan Langgung, 2003; Zubaedi, 2011). Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kesabaran ditanamkan secara konsisten kepada para sahabat melalui interaksi langsung dan pembiasaan berkelanjutan. Pola kepemimpinan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak efektif jika hanya disampaikan secara teoritis tanpa keteladanan nyata dari pemimpin (Ramayulis, 2015; Zubaedi, 2011).

Keteladanan (*uswah*) merupakan aspek sentral dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan karakter. Nabi menjadi figur sentral yang perilaku dan ucapannya menjadi rujukan utama umat. Dalam teori pendidikan Islam, keteladanan dipandang sebagai metode paling efektif dalam internalisasi nilai karena peserta didik belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap figur pemimpin yang dihormati (Abdul Majid, 2012; Hasan Langgung, 2003). Selain keteladanan, Nabi Muhammad SAW juga menerapkan pendekatan dialogis dalam mendidik karakter umat. Beliau membuka ruang diskusi, memberikan nasihat dengan bahasa yang santun, serta menyesuaikan metode penyampaian dengan kondisi psikologis individu. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan edukatif yang humanis dan komunikatif, sehingga nilai-nilai karakter dapat diterima tanpa paksaan (Mujamil Qomar, 2014; Ramayulis, 2015).

Kepemimpinan Nabi dalam pendidikan karakter juga ditandai dengan penegakan disiplin yang berkeadilan. Nabi Muhammad SAW tidak segan memberikan teguran atau sanksi, namun selalu dalam kerangka pendidikan dan perbaikan moral. Prinsip keadilan ini membentuk karakter kepemimpinan yang tegas namun tetap berlandaskan kasih sayang, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran moral, bukan rasa takut (Zuhairini, 2008; Abdul Majid, 2012). Dalam konteks sosial, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepemimpinan karakter dengan membangun solidaritas dan persaudaraan umat. Melalui pendidikan karakter, Nabi berhasil menghapus sekat kesukuan dan status sosial di kalangan masyarakat Arab. Nilai persamaan, keadilan sosial, dan empati ditanamkan sebagai karakter utama pemimpin dan anggota masyarakat, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis (Azyumardi Azra, 2012; Mujamil Qomar, 2014).

Kepemimpinan Nabi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap peran kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap individu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Pendidikan karakter berbasis tanggung jawab ini melahirkan generasi sahabat yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran etis dalam menjalankan tugas kepemimpinan (M. Quraish Shihab, 2007; Zubaedi, 2011). Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik karakter kepemimpinan terlihat dari lahirnya generasi sahabat yang memiliki kecakapan moral dan sosial. Para sahabat tidak hanya unggul dalam aspek spiritual, tetapi juga mampu memimpin masyarakat dan negara dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi bersifat transformatif dan berorientasi pada pembentukan peradaban (Azyumardi Azra, 2012; Ramayulis, 2015).

Dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW relevan dijadikan model dalam pengembangan pendidikan karakter. Krisis moral dan kepemimpinan dewasa ini menuntut pendekatan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembinaan akhlak dan kepribadian. Model kepemimpinan Nabi menawarkan solusi konseptual dan praktis dalam menjawab tantangan tersebut (Abdul Majid, 2012; Mujamil Qomar, 2014). Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan karakter merupakan paradigma pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Kepemimpinan ini menempatkan nilai-nilai akhlak sebagai inti dari proses pendidikan, sehingga melahirkan individu dan pemimpin yang berkarakter kuat. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan Nabi layak dijadikan rujukan utama dalam merumuskan pendidikan karakter, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia (Hasan Langgulang, 2003; Azyumardi Azra, 2012).

Landasan Al-Qur'an Metode Profetik dalam Pendidikan Kepemimpinan

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam perumusan metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan yang termaktub dalam Al-Qur'an tidak disajikan secara teknis-operasional, tetapi melalui prinsip-prinsip normatif yang membentuk karakter pemimpin beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan berlandaskan pada internalisasi nilai Qur'ani yang diwujudkan melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW (Didin Hafidhuddin, 2015; Ahmad Tafsir, 2012). Salah satu landasan utama metode profetik dalam Al-Qur'an adalah konsep *uswah hasanah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ahzab [33]: 21, Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ (الاحزاب/33: 21)

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah." (Al-Ahzab/33:21).

Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Saw merupakan teladan ideal dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Dalam perspektif pendidikan, keteladanan Qur'ani menjadi metode strategis dalam membentuk karakter kepemimpinan karena peserta didik belajar melalui figur nyata yang konsisten antara ucapan dan perbuatan (Ahmad Tafsir, 2012; Abuddin Nata, 2014).

Landasan Qur'ani lain dalam metode profetik adalah prinsip amanah yang menjadi karakter utama kepemimpinan. Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh manusia (QS. al-Ahzab [33]: 72), Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
٧٢ (الاحزاب/33: 72)

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh." (Al-Ahzab/33:72).

Dalam pendidikan kepemimpinan, amanah dipahami sebagai integritas moral yang menuntut kejujuran, komitmen, dan kesadaran etis dalam menjalankan tugas kepemimpinan (Didin Hafidhuddin, 2015; Syamsul Kurniawan, 2017). Prinsip keadilan juga menjadi landasan fundamental metode profetik dalam Al-Qur'an. Kepemimpinan yang adil diperintahkan secara tegas dalam QS. an-Nisa' [4]: 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ (النساء/4: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa'/4:58).

Ayat ini menekankan kewajiban pemimpin untuk menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks pendidikan kepemimpinan, nilai keadilan ditanamkan sebagai karakter yang harus dimiliki calon pemimpin agar mampu bersikap objektif dan tidak diskriminatif (M. Quraish Shihab, 2011; Abuddin Nata, 2014).

Al-Qur'an juga meletakkan prinsip musyawarah sebagai landasan kepemimpinan profetik, sebagaimana tercermin dalam QS. asy-Syura [42]: 38, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨ (الشورى/42: 38)

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;" (Asy-Syura/42:38).

Ayat ini menjelaskan Musyawarah mencerminkan kepemimpinan partisipatif yang menghargai pendapat orang lain. Dalam pendidikan kepemimpinan, prinsip ini membentuk karakter demokratis, terbuka, dan inklusif, sehingga kepemimpinan tidak bersifat otoriter melainkan kolektif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Toto Tasmara, 2006; Syamsul Kurniawan, 2017). Nilai kesabaran (*sabr*) juga menjadi fondasi penting metode profetik dalam Al-Qur'an. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dibangun atas kesabaran dalam menghadapi tantangan dan resistensi sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa kesabaran merupakan syarat utama keberhasilan kepemimpinan dan perjuangan (QS. Ali Imran [3]: 200), Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠ (آل عمران/3: 200)

"Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Ali 'Imran/3:200).

Dalam pendidikan kepemimpinan, kesabaran ditanamkan sebagai kekuatan moral dan emosional dalam mengelola konflik (M. Quraish Shihab, 2011; Didin Hafidhuddin, 2015).

Landasan Qur'ani metode profetik juga tampak dalam prinsip tanggung jawab sosial kepemimpinan. Al-Qur'an memandang kepemimpinan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat, bukan sekadar kekuasaan. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi orientasi kepemimpinan yang berkarakter transformasional dan berkeadaban (QS. Ali Imran [3]: 110), Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠ (آل عمران/3: 110)

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (Ali 'Imran/3:110).

Pendidikan kepemimpinan berbasis Qur'an menanamkan kesadaran bahwa pemimpin harus hadir sebagai agen perubahan sosial (Abuddin Nata, 2014; Syamsul Kurniawan, 2017). Selain itu, Al-Qur'an mengajarkan kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang dan empati, sebagaimana tercermin dalam QS. Ali Imran [3]: 159, Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩ (آل عمران/3: 159)

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali 'Imran/3:159).

Ayat ini menunjukkan bahwa kelembutan dan sikap humanis merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan Nabi. Dalam pendidikan kepemimpinan profetik, nilai empati menjadi karakter utama agar pemimpin mampu memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara bijaksana (Toto Tasmara, 2006; Ahmad Tafsir, 2012).

Metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan juga berlandaskan pada prinsip konsistensi antara nilai dan tindakan (*integritas*). Al-Qur'an mengemukakan keras ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan (QS. ash-Shaff [61]: 2–3), Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ (الصَّافَّاتُ: 2-3)

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?, Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (As-Saff/61:2-3).

Pendidikan kepemimpinan berbasis Qur'ani menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemimpin (Didin Hafidhuddin, 2015; Abuddin Nata, 2014). Dengan demikian, Al-Qur'an menyediakan landasan normatif dan metodologis bagi pengembangan metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan. Nilai-nilai keteladanan, amanah, keadilan, musyawarah, kesabaran, dan tanggung jawab sosial menjadi kerangka utama pembentukan karakter pemimpin berintegritas. Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan berbasis metode profetik Qur'ani relevan diterapkan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer sebagai upaya melahirkan pemimpin yang berakhlak dan berdaya transformasi (Ahmad Tafsir, 2012; Syamsul Kurniawan, 2017).

Model Metode Profetik Pendidikan Kepemimpinan Perspektif Al-Qur'an

Model metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan perspektif Al-Qur'an berpijak pada pandangan bahwa kepemimpinan merupakan amanah ilahiah yang harus dibangun melalui proses pendidikan berbasis nilai-nilai kenabian. Al-Qur'an tidak hanya memuat prinsip normatif kepemimpinan, tetapi juga memberikan pola pendidikan kepemimpinan melalui kisah para nabi yang sarat dengan nilai pedagogis dan keteladanan moral. Oleh karena itu, metode profetik dipahami sebagai model pendidikan kepemimpinan yang menekankan integrasi iman, ilmu, dan akhlak dalam pembentukan karakter pemimpin (Muhaimin, 2011; Abdul Majid, 2014). Salah satu model metode profetik dalam Al-

Qur'an adalah metode keteladanan (*modeling*) yang tercermin dari kisah Nabi Ibrahim AS sebagai figur pemimpin tauhid. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 124, Allah SWT berfirman:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ (البقرة/2: 124)

"(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku." Allah berfirman, "(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." (Al-Baqarah/2:124).

Ayat ini menegaskan pengangkatan Ibrahim sebagai imam bagi manusia setelah melalui serangkaian ujian. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif profetik dibangun melalui proses pendidikan yang menumbuhkan keteguhan prinsip, ketakwaan, dan komitmen moral, sehingga keteladanan menjadi metode utama dalam pendidikan kepemimpinan (Azyumardi Azra, 2012; Abdurrahman Mas'ud, 2017).

Model metode profetik berikutnya adalah metode pembiasaan nilai melalui peneguhan karakter istiqamah, sebagaimana tercermin dalam QS. Hud [11]: 112, Allah SWT berfirman:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (هود/11: 112)

"Maka, tetaplah (di jalan yang benar), sebagaimana engkau (Nabi Muhammad) telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Hud/11:112).

Ayat ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan nilai kebenaran sebagai fondasi kepemimpinan. Dalam konteks pendidikan kepemimpinan, pembiasaan sikap istiqamah membentuk karakter pemimpin yang tidak mudah goyah oleh tekanan situasi, serta mampu menjaga integritas dalam menjalankan amanah kepemimpinan (Zubaedi, 2011; Muhaimin, 2011). Al-Qur'an juga menghadirkan model metode profetik melalui pendidikan kepemimpinan berbasis tanggung jawab dan akuntabilitas, sebagaimana tergambar dalam QS. al-Mu'minun [23]: 8-9, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ (المؤمنون/23: 8-9)

"(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, serta orang-orang yang memelihara salat mereka." (Al-Mu'minun/23:8-9).

Ayat ini menegaskan bahwa orang beriman adalah mereka yang menjaga amanah dan janji. Model ini mengajarkan bahwa kepemimpinan harus dilatih sejak

dini melalui internalisasi nilai tanggung jawab, sehingga peserta didik memahami kepemimpinan sebagai beban moral, bukan sekadar posisi struktural (Abdul Majid, 2014; Zubaedi, 2011).

Metode profetik dalam pendidikan kepemimpinan juga diwujudkan melalui model dialogis dan komunikatif, sebagaimana tercermin dalam dialog Nabi Musa AS dengan Allah dan umatnya. QS. Thaha [20]: 25-28, Allah SWT berfirman:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ٢٦ وَاخْلُفْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٢٨ (طه/20: 25-28)

"Dia (Musa) berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." (Taha/20:25-28).

Ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Musa memohon kelapangan dada dan kemampuan komunikasi sebagai bekal kepemimpinan. Ayat ini memberikan dasar bahwa pendidikan kepemimpinan harus mengembangkan kecakapan komunikasi, empati, dan kemampuan dialog sebagai bagian dari metode profetik Qur'ani (Abdurrahman Mas'ud, 2017; Azyumardi Azra, 2012). Model metode profetik lainnya adalah pendidikan kepemimpinan melalui penguatan spiritualitas, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Anfal [8]: 2-4, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ (الانفال/8: 2-4)

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah,304 gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, Menyebut nama Allah Swt. di sini berarti menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan-Nya. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia." (Al-Anfal/8:2-4).

Ayat ini menegaskan bahwa kekuatan kepemimpinan orang beriman bersumber dari keteguhan iman dan ketawakkalan kepada Allah. Dalam pendidikan kepemimpinan, penguatan spiritual berfungsi sebagai pondasi etik dan motivasional agar pemimpin tidak terjebak pada pragmatisme kekuasaan (Muhaimin, 2011; Zubaedi, 2011).

Al-Qur'an juga menampilkan model pendidikan kepemimpinan melalui proses pengkaderan dan regenerasi, sebagaimana tampak dalam kisah Nabi Yusuf AS. QS. Yusuf [12]: 55, Allah SWT berfirman:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ٥٥ (يوسف/12: 55)

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan." (Yusuf/12:55).

Ayat ini menggambarkan kesiapan Yusuf memimpin karena kompetensi dan integritasnya. Ayat ini menunjukkan bahwa metode profetik menekankan pentingnya kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan moral sebagai syarat kepemimpinan, sehingga pendidikan kepemimpinan harus berbasis pada merit dan kapasitas personal (Abdul Majid, 2014; Abdurrahman Mas'ud, 2017). Model metode profetik pendidikan kepemimpinan juga mencakup pendidikan pengendalian diri dan etika kekuasaan. Hal ini tercermin dalam QS. al-Qashash [28]: 26, Allah SWT berfirman:

قَالَتْ اخْدُهَا يَا بَنِي اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ (القصص/28: 26)

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qasas/28:26).

Ayat ini menekankan kriteria pemimpin ideal, yaitu kuat (*al-qawiy*) dan terpercaya (*al-amin*). Ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan kepemimpinan harus mengintegrasikan kekuatan kompetensi dengan integritas moral agar kepemimpinan tidak menyimpang dari nilai keadilan (Zubaedi, 2011; Azyumardi Azra, 2012).

Selain itu, Al-Qur'an menghadirkan model metode profetik melalui pendidikan kepemimpinan berbasis kesadaran akhirat dan pertanggungjawaban moral. QS. az-Zalzalah [99]: 7-8, Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨ (الزلزلة/99: 7-8)

"Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya." (Az-Zalzalah/99:7-8).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, sekecil apa pun. Dalam pendidikan kepemimpinan, kesadaran ini membentuk karakter pemimpin yang berhati-hati dalam mengambil keputusan serta berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Muhaimin, 2011; Abdul Majid, 2014). Dengan demikian, model metode profetik pendidikan kepemimpinan perspektif Al-Qur'an bersifat holistik, integratif, dan transformatif. Model ini menggabungkan keteladanan, pembiasaan nilai, dialog, spiritualitas, kompetensi, dan tanggung jawab moral sebagai satu kesatuan pendidikan kepemimpinan. Relevansi metode profetik Qur'ani terletak pada kemampuannya membentuk pemimpin berkarakter, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga layak dijadikan model pendidikan kepemimpinan Islam kontemporer (Azyumardi Azra, 2012; Abdurrahman Mas'ud, 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an menghadirkan model pendidikan kepemimpinan yang bersifat holistik, integratif, dan transformatif melalui metode profetik yang berlandaskan nilai-nilai kenabian. Metode ini tidak hanya menekankan aspek kognitif dan keterampilan kepemimpinan, tetapi secara simultan membentuk dimensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Pendidikan kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai proses penanaman amanah, keteladanan, tanggung jawab, integritas, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dalam berbagai kisah Qur'ani. Dengan demikian, kepemimpinan tidak dipandang semata-mata sebagai jabatan struktural, melainkan sebagai amanah moral yang harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran. Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa metode profetik relevan untuk diimplementasikan dalam konteks pendidikan kontemporer karena mampu menjawab krisis kepemimpinan yang ditandai oleh lemahnya karakter, etika, dan keteladanan. Melalui metode keteladanan, pembiasaan nilai, dialog edukatif, penguatan spiritual, serta pengembangan kompetensi dan tanggung jawab sosial, pendidikan karakter kepemimpinan berbasis Al-Qur'an berpotensi melahirkan pemimpin yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, integrasi metode profetik dalam sistem pendidikan Islam menjadi kebutuhan strategis dalam membangun generasi pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetap juga kokoh secara spiritual dan moral dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penulis mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk memublikasikan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pengampu serta seluruh civitas akademika Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, atas arahan, dukungan akademik, dan suasana ilmiah yang mendukung selama proses penelitian dan penulisan karya ini. Di samping itu, penulis juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketekunan, konsistensi, dan komitmen yang telah dijaga hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2010). *Pendidikan karakter: Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustian, A. G. (2002). *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ)*. Jakarta: Arga.
- Al-Adluni, M. A. (2001). *Al-qiyādah fī al-qarn al-ḥādī wa al-'ishrīn*. Riyadh: Qurtubah Lil Intāḡ al-Fannī.
- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Al-jāmi' al-ṣaḥīḥ al-mukhtaṣar*. Beirut: Dār Ibn Katsīr.
- Al-Kummy, A. A., & Al-Qasim, A. Y. (1982). *At-tafsīr al-maudhu'ī lil-qur'ān al-karīm*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Al-Qayyim, M. bin A. B. (1973). *Al-fawā'id*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

-
- As-Syatibi, I. bin M. (1997). *Al-muwāfaqāt* (Tahqīq M. S. Salman). Riyadh: Dār Ibn ‘Affān.
- At-Thahhān, M. M. (2010). *At-tarbiyah wa dawruhā fī tasykīl as-sulūk*. Kairo: Dār aṣ-Ṣaḥwah.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Covey, S. R. (2004). *The 8th habit: From effectiveness to greatness*. London: Simon & Schuster.
- Dahlan, M. (2018). Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. *Jurnal Rihlah*, 6(2), 165–182.
- Dasuqi, G. (2017). Guru pemberi hukuman telanjang siswa SD minta maaf. *Detik News*.
<https://news.detik.com>
- Furchan, A. (1992). *Pengantar metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gymnastiar, A. (2013). *Membangun karakter baik dan kuat*. Bandung: SMS Tauhid.
- Hanafi, M. M., dkk. (2012). *Kenabian (nubuwwah) dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI.
- Hart, M. H. (1993). *The 100: A ranking of the most influential persons in history*. Canada: Carol Publishing Group.
- Hidayat, K. (2015). *Agama punya seribu nyawa*. Jakarta: Noura Books.
- Kartini, K. (1998). *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koesoema, D. (2010). *Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: Grasindo.
- Madjid, N. (2000). *Islam doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, C. (2016). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masriadi. (2018). Kepala dinas perindustrian Aceh Utara ditangkap karena isap sabu. *Kompas Regional*.
<https://regional.kompas.com>
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, M. (2000). *Mabāḥits fī at-tafsīr al-maudhu’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Nata, A. (2013). *Pemikiran pendidikan Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, A. (2016). *Manajemen pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, M. (2020). Kepala sekolah dan guru SD di Bogor korupsi dana BOS. *Tribun Jabar*.
<https://jabar.tribunnews.com>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- Rosidin, I. (2020). Kepala sekolah cabuli siswi sejak SD. *Kompas Regional*.
<https://regional.kompas.com>
-

-
- Sakdiah. (2016). Karakteristik kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Al-Bayan*, 22(33), 25–40.
- Salim, & Syahrum. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sauri, S. (2011). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 1–14.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siagian, S. P. (2015). *Teori dan praktik kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwaidean, T., & Basyāhil, F. (2011). *Ṣinā'atu al-qā'id*. Riyadh: Maktabah al-'Abikān.
- Suyanto. (2010). Pendidikan karakter: Teori dan aplikasi. *Jurnal Pendidikan*, 16(1), 1–10.
- Syauqi, T. (1992). *As-sulūk al-qiyādī wa fa'āliyat al-idārah*. Kairo: Dār Gharīb.
- Tafsir, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kaleidoskop pendidikan nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Yamin, F. (2015). Guru pukul murid pakai mistar hingga tewas. *Kompas Regional*.
<https://regional.kompas.com>
- Yousda, I. I. A. (1993). *Penelitian dan statistik pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana..